

PERENCANAAN TERPADU DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO

*Stefly N.D Mulalinda*¹
*Ismail Sumampow*²
*Alfon Kimbal*³

Abstrak

Perencanaan pembangunan daerah mempunyai peranan yang sangat besar sebagai alat untuk mendorong dan mengendalikan proses pembangunan secara lebih cepat dan terarah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam bentuk keterpaduan perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah sehingga perencanaan tersebut dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik dikabupaten dan kota, provinsi dan nasional. Perencanaan pembangunan terpadu dimaksudkan untuk pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pembangunan daerah terpadu, proses perencanaan dapat diartikan sebagai suatu usaha memaksimalkan segala sumberdaya yang ada pada suatu wilayah atau negara untuk tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduknya. yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa Proses perencanaan terpadu dilakukan oleh Badan Perencanaan pembangunan kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro, namun perlu penajaman-penajaman melalui peningkatan koordinasi dan penyamaan persepsi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga perencanaan dapat dilakukan secara terpadu dan partisipatif, Faktor penghambat proses perencanaan terpadu yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro adalah masih adanya ego sektoral dan keterbatasan alokasi anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kata Kunci : Perencanaan, Pembangunan, Perencanaan Pembangunan Daerah.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Kebijakan desentralisasi telah di terapkan sebagai konsekuensi politik pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata. Arah dan tujuan pembangunan daerah tidak lagi di tentukan oleh kebijakan nasional karena sistem pemerintahan desentralisasi akan mendelegasikan kewenangan pembangunan lebih besar kepada pemerintahan daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Delegasi kewenangan penentuan arah pembangunan harus linear dengan aspirasi masyarakat daerah sebagaimana di kukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Desentralisasi di harapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan birokrasi didaerah dengan lebih memberdayakan peran serta masyarakat dan mengakomodasi partisipasi masyarakat serta mendorong kemandirian termasuk di antaranya dalam penyusunan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.

Perencanaan merupakan proses yang berkesinambungan, berkelanjutan sejak dari tahap survei hingga tahap pengamatan. Perencanaan fisik merupakan bagian atau alat organisasi masyarakat dan pengawasan atau control penggunaan sumber daya. Pada kenyataannya proses perencanaan merupakan kegiatan yang tidak pernah selesai, karena selalu memerlukan peninjauan ulang atau pengkajian, guna memberikan umpan balik dalam proses evaluasi. Dalam proses penentuan alternatif, pemilihan alternatif, dan evaluasi diperlukan analisis yang seksama. Perencanaan daerah disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat dan mencakup penyelenggaraan pemerintahan daerah,

organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah, kepala daerah dan aparatur daerah, keuangan daerah, potensi sumber daya daerah, peraturan dan produk hukum daerah, kependudukan, informasi dasar kewilayahan dan informasi lainnya termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah (perda) dan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam bentuk keterpaduan perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah sehingga perencanaan tersebut dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik dikabupaten dan kota, provinsi dan nasional. Perencanaan pembangunan terpadu dimaksudkan untuk pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam pembangunan daerah terpadu, proses perencanaan dapat diartikan sebagai suatu usaha memaksimalkan segala sumberdaya yang ada pada suatu wilayah atau negara untuk tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduknya. Untuk dapat menerapkan asas memaksimalkan manfaat segala analisis atau kedua faktor yang tidak saling menenggang tersebut.

Setelah terjadinya proses pembangunan yang berkelanjutan disuatu daerah maka keadaan social suatu daerah akan berubah, lambat atau cepat. Berbagai perubahan ini tentu saja akan berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat, sehingga selanjutnya berpengaruh pula pada keadaan fisik daaerah/kota. Daerah atau kota yang mengalami urbanisasi besar, mengalami perubahan ekonomi dan fisik yang juga bergerak dengan cepat.

Perencanaan pembangunan daerah

mempunyai peranan yang sangat besar sebagai alat untuk mendorong dan mengendalikan proses pembangunan secara lebih cepat dan terarah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2005-2025 menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ini disebabkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 merupakan tahapan ketiga dan keempat pelaksanaan pembangunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Alur tahapan dan penetapan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan yang lain. Oleh sebab itu, tekanan pada skala prioritas dari setiap tahapan berbeda-beda, tetapi harus berkesinambungan dari periode satu ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang telah disusun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ketiga (2018-2023) diarahkan dengan tetap berpegang pada capaian kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kedua (2013-2018). Sesuai dengan hasil implementasi pencapaian dan sebagai keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kedua, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ketiga diarahkan untuk mengakselerasikan pembangunan tiga aspek kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, yakni: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, dan, memacu peningkatan kontribusi sektor pariwisata dan agroindustri terhadap

pembangunan daerah.

Pemerintah kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro mengupayakan berbagai program dan kegiatan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk beberapa program strategis diantaranya menyediakan beras bagi masyarakat miskin (Raskin) gratis, penyediaan pendidikan gratis mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK serta memberikan beasiswa untuk anak-anak yang melanjutkan studi ke tingkat universitas, dan juga dalam bidang pertanian pemerintah memberikan bibit serta pupuk untuk masyarakat dalam bercocok tanam.

Permasalahan yang terjadi dalam perencanaan terjadi dalam perencanaan terpadu adalah . Masing-masing satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih berjalan sesuai keinginan sendiri. Oleh sebab itu dibutuhkan penyatuan persepsi tentang perencanaan serta penyesuaian dengan anggaran yang tersedia bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan skala prioritasnya. Kondisi geografi daerah kepulauan terkadang menghambat penyebaran informasi terkini tentang perkembangan program karena komunikasi yang belum lancar karena keterbatasan jaringan telepon dan hanya mengandalkan pertemuan konsultasi yang frekuensinya sangat jarang.koordinasi lintas sector masih belum optimal sehingga sering terjadi keterlambatan dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian pola dan tata hubungan kerja antar sector masih menjadi penyebab utama menjadi penghambat berjalannya perencanaan terpadu. Ditingkat kecamatan masih memiliki berbagai keterbatasan terutama dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya perencana, proses perencanaan ditingkat bawah masih mengedepankan “keinginan” dari pada “kebutuhan”. Kondisi ini diperburuk dengan

masih adanya ego sektoral pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Tinjauan Pustaka

Konsep Perencanaan

Rustiadi (2008:339) menyatakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan- tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.

Menurut Bintoro Tjokroaminoto dalam bukunya husani Usman (2008:60) Perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Adisasmita, Raharjo. (2011:22) mendefinisikan perencanaan adalah pengambilan keputusan tentang apa yang akan di kerjakan, kapan mengerjakannya dan bagaimana mengukur keberhasilan pelaksanaannya.

Menurut Usman perencanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan dan dalam perencanaan itu mengandung beberapa unsur, diantaranya sejumlah kegiatan yang di tetapkan sebelumnya, adanya proses, hasil yang ingin dicapai menyangkut masa depan dalam waktu tertentu.

Menurut S.P Siagian (2015: 88) perencanaan dapat di definisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tentukan.

Menurut George R. Terry (2008:46) perencanaan merupakan pemilihan dan menghubungkan fakta , menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang di perlukan

untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Uno, Hamzah. B. (2010:2) Menjelaskan perencanaan yakni suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Menurut Kurniadin dan Imam Machali (2016:139) menyatakan bahwa perencanaan pada dasarnya adalah sebuah proses kegiatan untuk menyiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertetu.

Konsep Pembangunan

Penggunaan kata pembangunan telah di populerkan oleh para sarjana dan pembuat kebijakan di Amerika Serikat yang di perkenalkan ke eropa barat dan negara-negara dunia ketiga yang sedang berkembang. Pembangunan berasal dari kata *development*. Kata *development* ini diartikan sebagai pembangunan atau perkembangan dan perubahan social.

Menurut Nasution (2008:43) pembangunan di definisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar dalam rangka Pembina bangsa. Berdasarkan rumusan diatas penulis akan mengemukakan beberapa teori atau pendapat, atau pun gagasan yang akan di jadikan sebagai landasan berpikir dalam penelitian ini.

Menurut S.P Siagian (2008:40), pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah.

Theresia, Aprilia et.al. (2014:2) mengungkapkan adanya beragam rumusan yang dikemukakan oleh banyak pihak mengenai pembangunan, namun kesemuanya itu mengarah pada kesepakatan bahwa,

pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu.

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 2011:9-11)

Perencanaan Pembangunan Daerah

Supriyadi Bratakusumah (2004:7) dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas. Berarti, Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) akan membentuk tiga hal pokok yang meliputi: perencanaan komunitas, menyangkut suatu area (daerah), dan sumber daya yang ada di dalamnya. Pentingnya orientasi holisti dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dengan tingkat kompleksitas yang besar tidak mungkin kita mengabaikan masalah-masalah yang muncul sebagai tuntutan kebutuhan sosial yang tak terelakkan. Tetapi dipihak lain

adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki tidak memungkinkan pula untuk melakukan proses pembangunan yang langsung menyentuh atau mengatasi seluruh permasalahan dan tuntutan secara sekaligus. Dalam hal inilah penentuan prioritas perlu dilakukan, yang dalam prakteknya dilakukan melalui proses perencanaan.

Supriady Baratakusumah (2004:8) merekomendasikan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks tadi, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan, serta sumber-sumber daya lainnya.

Perencanaan Pembangunan Terpadu

Pada era otonomi daerah, peran pemerintah daerah menjadi sangat luas terutama dalam pelaksanaan pembangunan sedangkan perencanaan pembangunan daerah diperlukan karena pelaksanaan pembangunan di desentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Beberapa pendapat pakar pembangunan menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi pedoman dan acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Menurut Sjahfrizal (2009), secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Sementara itu, Affandi Anwar dan Setia Hadi dalam Riyadi (2008) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan wilayah diartikan

sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan disuatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antarasumberdaya manusia dengan sumberdaya lain, termasuk sumberdaya alam dan lingkungan melalui investasi.

Menurut Sujardi Abdul Hamid, perencanaan terpadu mengandung empat aspek, yaitu: 1) penerapan perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, 2) mengefektifkan perencanaan pada tataran sektor atau di lingkungan pemerintah daerah, 3) sinkronisasi *National planning*, dan 4) sinkronisasi *planning* dan *budgeting*.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:15) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumberdata dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistic, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses dari pada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Fokus Penelitian Ini adalah: Menurut Sujardi Abdul Hamid, perencanaan terpadu mengandung empat aspek, yaitu: 1) penerapan perencanaan partisipatif yang

melibatkan seluruh pemangku kepentingan, 2) mengefektifkan perencanaan pada tataran sektor atau di lingkungan pemerintah daerah, 3) sinkronisasi *National planning*, dan 4) sinkronisasi *planning* dan *budgeting*.

Hasil Penelitian

Dalam hasil penelitian ini akan dilakukan penyajian data yang telah diperoleh dilapangan baik yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun dari dokumen-dokumen. Penyajian data merupakan data yang diperoleh dari lapangan dan dianggap relevan untuk menjawab permasalahan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian metode penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif menjangkau informasi dan kondisi yang sebenarnya dalam kehidupan suatu objek yang dihubungkan dalam pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian ini dalam rangka untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga dapat mengetahui bagaimana perencanaan terpadu di badan perencanaan pembangunan kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro.

Berikut adalah hasil wawancara dengan beberapa narasumber terkait dengan bagaimana Perencanaan Terpadu di badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten siau tagulandang biaro, melalui teori Menurut Sujardi Abdul Hamid, perencanaan terpadu mengandung empat aspek, yaitu: 1) penerapan perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, 2) mengefektifkan perencanaan pada tataran sektor atau di lingkungan pemerintah daerah, 3) sinkronisasi *National planning*, dan 4) sinkronisasi *planning* dan *budgeting*.

Sinkronisasi Perencanaan Nasional dan Perencanaan Daerah

Sinkronisasi Perencanaan Nasional dan Perencanaan Daerah menurut narasumber

berinisial WB selaku Kepala badan penelitian pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah beliau mengatakan bahwa:

“Perencanaan nasional dan perencanaan daerah itu harus menyatu, sehingga semua pembangunan di daerah harus mengikuti tahapan-tahapan, berdasarkan kebutuhan sehingga usulan program daerah tidak sesuai menu yang di pusat maka pasti daerah itu tidak akan dapat berjalan sehingga harus ada sinkron kebutuhan di daerah dengan perencanaan pusat sehingga semua bisa berjalan dengan baik.”

Hasil wawancara dengan narasumber AB selaku kepala sub bidang perencanaan dan pelaporan di kantor camat tagulandang utara mengatakan :

“perencanaan nasional dan perencanaan Daerah harus Sinkron,karena

Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran

Berdasarkan informan yang diperoleh, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan terkait dengan bagaimana sinkronisasi antara perencanaan dan anggaran yang ada, berdasarkan keterangan dari informan, mereka telah melakukan sinkronisasi antara perencanaan dan dana yang ada seperti yang dikatakan oleh WB selaku Kepala badan penelitian pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah:

“sinkronisasi antara perencanaan dan anggaran yang tersedia walaupun daerah mempunyai usulan program itu lebih banyak tetapi itu harus disesuaikan dengan kemampuan dengan keuangan daerah yang diberikan oleh pusat, jadi apbd itu harus disesuaikan, penganggarnya yang diambil itu berdasarkan anggaran tahun sebelumnya ditambah 5%”

Demikian juga hasil wawancara dengan narasumber yang berinisial AT selaku Kepala sub bidang perencanaan social budaya

menyatakan bahwa:

“Sinkronisasi itu dilakukan berdasarkan prioritas provinsi itu disinkronkan dengan prioritas daerah, sehingga antara perencanaan dan anggaran yang tersedia itu ada sinkronisasi”

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan terpadu yang diusulkan dari tingkat kecamatan telah sesuai dengan visi misi seperti Narasumber yang berinisial WB selaku Kepala badan penelitian pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah beliau mengatakan bahwa :

“perencanaan yang dibuat sesuai dengan visi dan misi kabupaten. Karena pemerintah daerah menyusun semua itu berdasarkan usulan dan kebutuhan dari masyarakat”.

Seperti halnya yang di katakan narasumber berinisial AB selaku kepala sub bidang perencanaan dan pelaporan di kantor camat tagulandang utara mengatakan:

“pemerintah daerah membuat perencanaan pembangunan itu sesuai dengan visi dan misi kabupaten.”

Faktor-Faktor Penghambat Proses Perencanaan Terpadu pada Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro

Hambatan dalam proses perencanaan terpadu di badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten Siau Tagulandang Biaro menurut narasumber yang berinisial WB selaku Kepala badan penelitian pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah beliau mengatakan bahwa:

“kesenjangan dalam kesamaan persepsi tentang penyusunan perencanaan terpadu. Masing-masing satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih berjalan sesuai keinginan sendiri. Oleh sebab itu dibutuhkan penyatuan persepsi tentang

perencanaan serta penyesuaian dengan anggaran yang tersedia bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan skala prioritasnya. Kondisi geografi daerah kepulauan terkadang menghambat penyebaran informasi terkini tentang perkembangan program karena komunikasi yang belum lancar karena keterbaasan jaringan telepon dan hanya mengandalkan pertemuan konsultasi yang frekuensinya sangat jarang.

Narasumber berinisial AB selaku kepala sub bidang perencanaan dan pelaporan di kantor camat tagulandang utara mengatakan:

“Ditingkat kecamatan masih memiliki berbagai keterbatasan terutama dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya perencana, proses perencanaan ditingkat bawah masih mengedepankan “keinginan” dari pada “kebutuhan”. Kondisi ini diperburuk dengan masih adanya ego sektoral pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

anggaran saja. Permasalahan lainnya yang menjadi penghambat dalam proses perencanaan terpadu adalah masih kentalnya ego sektoral dalam proses perencanaan.

Kesimpulan

Memperhatikan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian sebagaimana telah dijabarkan di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses perencanaan terpadu dilakukan oleh Badan Perencanaan pembangunan kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro, namun perlu penajaman-penajaman melalui peningkatan koordinasi dan penyamaan persepsi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga

perencanaan dapat dilakukan secara terpadu dan partisipatif.

2. Faktor penghambat proses perencanaan terpadu yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro adalah masih adanya ego sektoral dan keterbatasan alokasi anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Saran

1. dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan terpadu di kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro, maka upaya untuk menyamakan persepsi diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang visi misi kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro harus lebih ditingkatkan melalui berbagai forum, selain itu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencana pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro hendaknya dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk memaksimalkan proses penyusunan dokumen perencanaan.

2. Peningkatan koordinasi antara Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai koordinator perencanaan di daerah, dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyamakan persepsi terkait strategi yang efektif dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang paripurna, dan pada gilirannya akan meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui output dan outcome, dari program dan kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

- bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro.
3. Pemerintah daerah kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro perlu memperhatikan kesesuaian paradigm otonomi daerah dengan pembangunan daerah yang dilandasi dengan perencanaan terpadu dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat madani akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi perencanaan pembangunan daerah yang terpadu.
 4. Pemerintah daerah kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro perlu memperhatikan kesesuaian prosedur perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan politik dan kondisi social budaya kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro yang multi etnik dan multi budaya serta agama hendaknya menjadi pertimbangan utama agar perencanaan daerah akan memenuhi kebutuhan masyarakat.
 5. Badan perencanaan pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai koordinator perencanaan pembangunan didaerah, harus lebih meperhatikan kesinambungan antara agenda setting dari pembangunan daerah dengan budgeting harus menjadi keutamaan dalam penerapan perencanaan pembangunan terpadu di masa mendatang, agar pembangunan daerah yang berkesinambungan dapat menjamin tercapainya visi misi kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro.
- Amien, Mappadjantji, 2009, *Kemandirian Lokal “Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru”*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Aprilia, Theresia, et.al. 2015, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- BrataKusumah, Supriyady. 2008. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Effendy, Bachtiar, 2008, *Pembangunan Daerah Ekonomi Berkeadilan*, Yogyakarta: Uhaindo Dan Offset.
- George R. Terry 2008, *Dasar-dasar Manajemen*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Husani Usman, 2008. *Manajemen Teori Praktik Dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kunarjo, 2009, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembagunan*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
- Kurniadin dan Imam Machali. 2016. *Manajemen Pendidikan: Konsep & Prinsip Pengolahan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Nasution, 2008, *Manajemen Transportasi*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rochajat, 2011. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: PT.Raja Graffindo Persada.
- Rustiadi, et al. 2011.*Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crestpent Pres dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Affifudin, 2012, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Alfabeta, Bandung.

- Siagian, P. Sondang, 2008, *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sjahfrizal, 2009. *Teknis praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*. Baduouse, Media, Jakarta.
- Subandi, 2011, *Ekonomi Pembangunan*,

Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Todoro, Michael P. 2010. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Trijono. 2007, *Pembangunan Sebagai Perdamaian*. Jakarta Yayasan Obor Indonesia.

Uno, Hamzah. B. 2010. *Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sumber-Sumber Lain:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang *Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*